

MENELUSURI KEGAGALAN OSCE DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN MELALUI ANALISIS RESOLUSI KONFLIK

Azizah Ika Meichella¹, Raisa Nur Annamira², Akim³, Windy Dermawan⁴

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

E-mail: azizah21001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Armenia dan Azerbaijan berada dalam situasi konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Sejarah konflik Armenia-Azerbaijan kembali pada masa Soviet, ketika Nagorno-Karabakh diberikan status otonomi di Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat, dengan pecahnya perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung hingga tahun 1994. Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut salah satunya adalah melalui Minsk Group di bawah OSCE. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik dan penyelesaian konflik belum dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor kegagalan OSCE (Minsk Group) dalam mengatasi konflik Nagorno-Karabakh menggunakan alat analisis konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berfokus menggali lebih dalam teks narasi penelitian terkait. Hasil penemuan menjelaskan bahwa peran pihak ketiga seperti organisasi internasional sangat krusial mengingat kedua belah pihak memiliki tendensi untuk menuduh satu sama lain yang membuat isu ini berkepanjangan. Keterlibatan banyak pihak di luar Minsk Group juga menyebabkan konflik ini semakin runyam. Adapun peneliti memberikan rekomendasi resolusi untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan memperbaiki dan merestrukturisasi organisasi internasional yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengulas kembali karakteristik OSCE sebagai organisasi internasional agar bisa bergerak selayaknya sebuah organisasi mediasi konflik. Menyamakan visi misi serta tujuan penyelesaian konflik antar negara anggota juga sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perspektif dalam prosesnya, hingga menggali lebih dalam mengenai asal mula juga akar kesukuan yang akhirnya menjadi inti utama konflik ini. Dengan ditemukannya resolusi ini, jika pada negara-negara lain ditemukan permasalahan yang serupa, proses pencarian resolusi dari konflik tersebut akan dipermudah dengan adanya penelitian ini.

Kata Kunci: analisis konflik; nagorno-karabakh; organisasi internasional; OSCE; resolusi konflik.

ABSTRACT

Armenia and Azerbaijan are in a prolonged conflict situation in Nagorno-Karabakh region. The history of the Armenia-Azerbaijan conflict goes back to Soviet times, when Nagorno-Karabakh was granted autonomous status within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, although the majority of its population was ethnic Armenian. After the collapse of the Soviet Union in 1991, tensions between Armenia and Azerbaijan increased, with the outbreak of the Nagorno-Karabakh war which lasted until 1994. Various efforts were made to resolve the conflict, one of which was through the Minsk Group under the OSCE. However, these efforts have not produced good results and conflict resolution has not been implemented completely. Based on these problems, the article examines further the factors of OSCE (Minsk Group) failure in resolving the Nagorno-Karabakh conflict using conflict analysis tools. The research methodology employed is descriptive qualitative, with a specific focus on delving further into narrative texts connected to the research topic. The findings explain that the role of third parties such as international organizations is very crucial considering that both parties have a tendency to accuse each other which makes this issue protracted. The involvement of many parties outside the Minsk Group also made this conflict even more complicated. The researchers provide recommendations for resolution to overcome this conflict, namely by improving and restructuring the international organizations involved in resolving the conflict as well as reviewing the characteristics of the OSCE as an international organization so that it can move like a conflict mediation organization. Synchronizing the vision and goals of conflict resolution between members is also necessary so that there are no longer differences in perspective in the process, as well as digging deeper into the origins and tribal roots which ultimately become the main core of this conflict. By finding this resolution, if similar problems are found in other countries, the process of finding a resolution to the conflict will be made easier by this research.

Keywords: conflict analysis, conflict resolution, international organization, nagorno-karabakh, OSCE.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik Armenia-Azerbaijan yang berkepanjangan telah menjadi sumber ketegangan dan kekerasan di wilayah Kaukasus Selatan. Persengketaan ini melibatkan wilayah Nagorno-Karabakh, yang dihuni oleh mayoritas etnis Armenia, namun secara hukum merupakan bagian dari Azerbaijan (Shafiyev 2022). Upaya untuk mencapai perdamaian dalam konflik ini telah melibatkan berbagai inisiatif dan lembaga internasional, termasuk OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa) yang menyelenggarakan Minsk Group. Sejarah konflik Armenia-Azerbaijan dapat ditelusuri kembali ke masa Soviet, ketika Nagorno-Karabakh diberikan status otonomi dalam Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat, dengan pecahnya perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung hingga 1994. Meskipun gencatan senjata dicapai, konflik ini tidak pernah mencapai penyelesaian yang tuntas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kegagalan OSCE, terutama Minsk Group, dalam menyelesaikan konflik Armenia-Azerbaijan. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, perdamaian yang berkelanjutan terus menjadi tantangan, dan penelitian ini akan menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut. Faktor-faktor ini mencakup dinamika politik di kawasan tersebut, kepentingan nasional dari masing-masing pihak yang terlibat, perbedaan budaya dan sejarah yang mendalam, serta potensi kekurangan dalam pendekatan resolusi konflik yang diambil oleh Minsk Group (Remler et al. 2022). Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah kunci untuk memandu penelitian ini. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kegagalan OSCE, terutama Minsk Group, dalam mencapai perdamaian yang

berkelanjutan akan diidentifikasi. Dinamika politik, kepentingan nasional, perbedaan budaya, dan sejarah yang kompleks akan dianalisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada kesulitan mencapai kesepakatan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada kekurangan dalam pendekatan yang diambil oleh Minsk Group, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana konflik ini dapat diatasi.

Sementara itu, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai konflik Armenia-Azerbaijan dan peran OSCE, melalui Minsk Group, dalam upaya resolusinya. Penelitian Prasada Arnaya et al. (2015) menganalisis peran OSCE Minsk Group sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik ini muncul setelah runtuhnya Uni Soviet dan berkaitan dengan perbedaan etnis di wilayah tersebut. OSCE Minsk Group, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia, berusaha memediasi konflik tersebut. Studi ini menggunakan konsep ethnonationalist dan mediasi dalam rentang waktu 2009-2013. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan peran OSCE Minsk Group dalam konflik Nagorno-Karabakh. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Abilov (2018) yang menganalisis kegagalan Minsk Group dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh terutama mengenai kekhawatiran Azerbaijan terhadap pengaruh negara-negara anggota OSCE seperti Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat yang memprioritaskan kepentingan nasional mereka dibanding mediasi konflik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat kurangnya penelitian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan OSCE, terutama Minsk Group, dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dalam konflik Armenia-Azerbaijan. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, kebanyakan hanya

membahas peran OSCE sebagai mediator tanpa menjelajahi secara mendalam faktor-faktor politik, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi kegagalan tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum melibatkan perspektif yang lebih luas dari pihak yang terlibat dalam konflik, seperti masyarakat sipil dan kelompok etnis, yang memberikan wawasan lebih komprehensif tentang dinamika konflik dan perdamaian yang efektif yang dapat diberikan dalam hasil dan pembahasan di dalam penelitian ini.

Selain itu, urgensi tulisan ini diangkat karena konflik Armenia-Azerbaijan merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan dan terus memunculkan ketegangan serta kekerasan di wilayah Kaukasus Selatan. Konflik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional dan kehidupan masyarakat di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan OSCE, terutama Minsk Group, dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Penulis memiliki ketertarikan khusus dalam mengangkat isu ini karena ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan ini. Penulis melihat perlunya menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan OSCE dalam menyelesaikan konflik ini. Dengan mempelajari dinamika politik di kawasan tersebut, kepentingan nasional yang terlibat, perbedaan budaya, dan sejarah yang mendalam, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada kesulitan mencapai kesepakatan. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengeksplorasi apakah ada kekurangan dalam pendekatan yang diambil oleh Minsk Group. Dengan menganalisis kegagalan yang terjadi, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konflik ini dapat diatasi dan bagaimana pendekatan yang lebih efektif

dapat diterapkan untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.

Ketertarikan penulis terhadap konflik Armenia-Azerbaijan juga melibatkan keinginan untuk melibatkan perspektif yang lebih luas, termasuk masyarakat sipil dan kelompok etnis yang terlibat dalam konflik. Dengan melibatkan perspektif ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika konflik dan perdamaian yang efektif yang dapat dicapai. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mengeksplorasi kontribusi Indonesia dalam konflik Armenia-Azerbaijan. Dengan mempertimbangkan peran Indonesia sebagai negara dengan kepentingan dalam perdamaian dan stabilitas regional, penulis berharap dapat memberikan perspektif baru dalam memahami konflik ini dan memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam mencapai perdamaian.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan OSCE, terutama Minsk Group, dalam mencapai perdamaian berkelanjutan dalam konflik Armenia-Azerbaijan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik, perbedaan budaya, dan sejarah yang kompleks yang mempengaruhi penyelesaian konflik Armenia - Azerbaijan. Adapun penelitian ini juga menelisik resolusi terhadap konflik ini serta problematika yang tidak kunjung selesai antara Armenia - Azerbaijan dalam konflik Nagorno - Karabakh terutama dalam peran organisasi internasional yang tidak efektif akibat keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini.

Landasan Teoritis

Konflik Identitas Bersenjata

Konsep yang akan sering ditemukan pada penelitian ini adalah konflik berlandaskan identitas yang didukung oleh gesekan serta konflik fisik atau bersenjata. Membahas sebuah akar permasalahan dari satu konflik berkepanjangan akan memakan banyak sekali waktu serta usaha agar bisa menemukan titik temu dan akhir

dari konflik. Konflik berlandaskan identitas yang bersenjata juga adalah salah satu konflik yang kompleks, juga sulit untuk diuraikan satu persatu dampak serta penyebabnya jika tidak diselaraskan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa penelitian terdahulu mengenai konflik berlandaskan identitas yang bersenjata telah berhasil menguraikan asumsi agar ditemukan titik tengah dalam menyelesaikan konflik terkait.

Menurut Bush & Keyman (1997), dalam menyelesaikan permasalahan konflik identitas bersenjata, diperlukan pemahaman bahwa pendekatan realisme tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk memahami konflik terkait. Ketika bertemu dengan permasalahan ini, diperlukan pemahaman lebih dalam bahwa isu seperti ini tidak selalu memerlukan persenjataan atau klasifikasi *a la realisme*. Kedua, Bush & Keyman menyatakan bahwa konflik seperti ini akan selalu ada dan faktanya bahwa sebelum ditemukan penyelesaian yang menyeluruh, diperlukan pemahaman mengenai hubungan relasional antara kebudayaan, sejarah, dan dinamika dari identitas yang berkonflik (Bush & Keyman 1997, 311). Dengan kedua argumen tersebut, akan ditemukan strategi yang tepat dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan konflik identitas bersenjata.

Organisasi Internasional

Ketika melihat landasan konsep untuk membahas organisasi internasional, rujukan paling awal adalah pemikiran dari Clive Archer (2001). Menurut Archer pada bab fungsi dan peran organisasi internasional kini dengan mudah dilihat oleh masyarakat peninjau, bahkan masyarakat awam karena pada era kontemporer, informasi akan mudah didapatkan dan organisasi internasional bisa dibentuk juga dipergunakan oleh masyarakat luas (Archer 2001, 65). Mengutip dari beberapa peneliti, Archer menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa perdebatannya sendiri dalam menentukan apakah entitas ini

adalah sebuah *network* atau *system*. Setelah menelisik lebih lanjut, Archer sampailah pada kesimpulan bahwa organisasi internasional adalah sebuah sistem yang kemudian akan dengan rekat dihubungkan ketika membahas keduanya (Archer 2001, 66-67).

Ketika akan berbicara mengenai organisasi internasional, kata *sistem internasional* akan sering digunakan. Sebab, organisasi internasional dengan caranya masing-masing memberikan pengaruh dan dampak atas satu sama lain dengan programnya sendiri-sendiri. Organisasi internasional bergerak dengan cara yang unik sebagai sebuah entitas, terlebih lagi dengan keberadaan OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) adalah sebuah IGO yang terdiri dari beberapa negara untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal keamanan dan kooperasi. Melihat pengertiannya sebagai sebuah instrumen, Archer menyatakan pemikiran Myrdal mengenai bagaimana dalam suatu organisasi internasional, ditemukan fungsi-fungsi yang merujuk pada kepentingan nasional negara yang tergabung dalam organisasi tersebut (Archer 2001, 68-69).

Kemudian, fungsi kedua adalah penyedia arena untuk negara-negara yang tergabung agar bisa berdiskusi dan bertemu dalam suatu forum. Dalam hal ini, sebuah diskusi serta forum internasional dapat dipahami sebagai ajang untuk berdiskusi, menyetujui, tidak menyetujui, bertukar pikiran, hingga berkooperasi juga bekerja sama. Selain itu, fungsi ini biasanya dilihat dari forum yang dianggap ajang drama, sirkus, bahkan permainan kontestasi politik (Archer, 2001, 73-74). Archer kemudian menyatakan bahwa diperlukan aktor yang nantinya akan menjadi pelaku utama dalam seluruh peran serta fungsi organisasi internasional ini. Mereka jugalah yang menjalankan fungsi pembentuk norma, memberikan ruang berartikulasi, serta melaksanakan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Resolusi Konflik

Konsep yang diambil untuk menganalisis konflik ini adalah konsep resolusi konflik yang terdiri dari beberapa jalur serta cara untuk mencapai kedamaian ketika terjadi sebuah konflik. John Burton menyatakan bahwa seringkali pengertian dari resolusi konflik disalahartikan karena bentuknya yang masih abstrak atau mudah disamakan dengan istilah lain. Perlu dipahami perbedaan antara resolusi dan penyelesaian sebuah konflik, yang mana penyelesaian bisa digapai walaupun konflik tersebut belum selesai dan memberikan kesan yang setengah jadi atau bisa naik kembali ke permukaan. Sedangkan resolusi dapat dipandang sebagai hasil akhir dari sebuah konflik, dimana pihak-pihak yang bermasalah sudah mencapai sebuah kesepakatan yang berkelanjutan (Burton 1989, 125).

Berbagai bentuk cara dalam mengatasi konflik, dengan sebutan yang berbeda-beda pula. Ada cara-cara tradisional dengan arbitrase, mediasi, konsiliasi, serta bentuk lainnya. Lalu, ada pula beberapa cara yang dapat diuraikan menjadi sebuah sistem, yaitu dengan menggeser dan menyesuaikan prioritas pihak-pihak yang berkonflik, berkompromi, melakukan horse-trading dengan menyesuaikan satu pihak mendapatkan semua yang ia mau dan pihak lain yang mendapatkan isu lain diselesaikan sepenuhnya, berbagi kekuatan, memberikan kontrol kepada pihak ketiga, arbitrase atau cara legal yang disetujui seluruh pihak, atau membiarkan konflik tersebut seperti sebelumnya.

Alat Analisis Resolusi Konflik

Dalam menganalisis konflik ini, diperlukan beberapa alat analisis agar terlihat dengan jelas asal mula kegagalan OSCE dalam menyelesaikan isu konflik berkepanjangan ini. Namun, satu alat analisis saja tidak cukup, sebab, perlu diketahui dari mana dan siapa saja kegagalan ini bisa terjadi. Maka, digunakan setidaknya dua alat analisis yang berupa peta konflik untuk memetakan aktor-aktor

yang terlibat. Pemetaan konflik adalah pendekatan metodis terhadap visualisasi dan analisis perselisihan yang mencakup komponen-komponen penting yang menawarkan pemahaman komprehensif tentang gambaran konflik. Pendekatan ini mengevaluasi sejauh mana konflik dengan menganalisis isu-isu kontroversial, hubungan, dan tujuan, serta posisi, kepentingan, dan jaringan dukungan eksternal dari pihak-pihak yang terlibat. Ini memantau perkembangan hubungan dari waktu ke waktu, sering kali menggunakan garis waktu untuk menekankan peristiwa penting dari berbagai sudut pandang. Proses pemetaan menyelidiki strategi resolusi dengan memeriksa hubungan antara kegiatan di tingkat mikro dan kekuatan di tingkat makro, selain mengatasi berbagai faktor (keamanan, politik, ekonomi, dan sosial). Yang terpenting, hal ini membantu para pihak dalam membedakan antara posisi yang mereka nyatakan dan kepentingan mendasarnya, sehingga berpotensi mengidentifikasi landasan bersama untuk negosiasi. Pemetaan konflik merupakan instrumen yang berharga untuk manajemen dan intervensi konflik yang efektif, karena memungkinkan pengembangan strategi yang tepat untuk pengendalian kekerasan dan penyelesaian damai dengan mensintesis informasi tersebut (Jeong, 2008).

Analogi yang kami gunakan setelah pemetaan adalah analogi pilar. Menurut Sandole (1998), pendekatan resolusi konflik meliputi hal-hal berikut: (1) Konflik (Pilar 1), yaitu berkaitan dengan pemahaman hakikat konflik dengan mengkaji pihak-pihak yang terlibat, permasalahan yang dipertaruhkan, tujuan mereka, dan lingkungan di mana konflik tersebut terjadi. dimana konflik terjadi; (2) Penyebab dan Kondisi Konflik (Pilar 2), yang menyelidiki faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap konflik, seperti keluhan historis dan kondisi sosial-ekonomi; dan (3) Intervensi Konflik (Pilar 3), yang berkaitan dengan tindakan yang

dilakukan oleh pihak ketiga untuk melakukan intervensi dalam konflik, dengan menekankan pentingnya tujuan yang jelas untuk penyelesaian yang efektif. Selain mengatasi penyebab langsung dan penyebab utama, kerangka kerja yang lengkap ini memungkinkan analisis terstruktur dan respons terhadap konflik. Dengan menggunakan dua alat analisis resolusi konflik, diharapkan dapat ditranslasikan menjadi resolusi konflik yang menyeluruh dalam menyelesaikan konflik terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks konflik Armenia-Azerbaijan dan kegagalan OSCE (Minsk Group) dalam menciptakan perdamaian. Metode kualitatif deskriptif bertujuan memberikan deskripsi terperinci dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Mengist et al. 2020), serta memahami perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan yang terlibat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dimana kami mengkaji lebih lanjut terkait teks-teks narasi terkait konflik Armenia - Azerbaijan yang berkaitan dengan peran Minsk Group dalam menyelesaikan konflik tersebut untuk disajikan dalam penelitian ini. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta media berita yang berkaitan (Leavy, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan OSCE Dalam Menyelesaikan Konflik Armenia dan Azerbaijan

Dalam penelitian lain, banyak sekali cara peneliti dalam menguraikan dan menginterpretasikan sebuah kasus yang kembali muncul ke permukaan ini pada tahun 2022. Namun, fokus utama dari artikel ini adalah melihat OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) terutama kelompok Minsk

dalam menyelesaikan konflik etnis serta perbatasan Nagorno-Karabakh dari tahun 1992. Dilansir dari Center of Foreign Relations (CFR) Center for Preventive Action pada fitur Global Conflict Tracker-nya, konflik ini adalah salah satu konflik perbatasan yang pada tahun 2022 kembali muncul ketegangan antar kedua negara terutama pada konflik militer (Center of Foreign Relations, 2024). Lalu, peran Minsk Group sampai sekarang masih dipertanyakan keefektifannya sebab kegagalannya pada tahun kurang lebih 2014 hingga 2017. Beberapa tangan ikut campur dalam permasalahan ini, namun sebelum itu, perlu dipahami terlebih dahulu asal mula konflik berkepanjangan yang hingga saat ini tidak kunjung usai (Cavanaugh 2017, 5) .

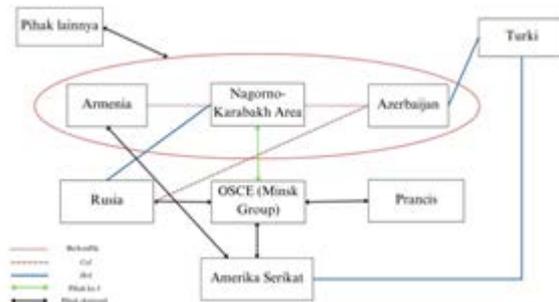
Pada kenyataannya, permasalahan konflik berbasis identitas bersenjata ini dimulai dari klaim antara kedua belah pihak. Azerbaijan dan Armenia mengaku bahwa daerah Nagorno-Karabakh tersebut berada pada wilayahnya masing-masing, dengan sejarah dan peninggalannya sendiri-sendiri. Menurut data dari laman resmi kedua pemerintahan setempat, mereka menuduh satu sama lain atas aksinya dalam menetapkan wilayahnya masing-masing. Namun, pada riset terdahulu, ditemukan sebuah pola yang sama mengenai asal mula isu ini terjadi, bahwa masyarakat Armenia masuk ke wilayah Azerbaijan dan kini mereka tampak berusaha untuk mengambil alih wilayah sengketa (Avdoyan 1995, 162-163). Menurut Avdoyan, sebagai seorang peneliti Amerika yang memiliki nama Armenia, ia menyatakan bahwa disebutkan pada sebuah pertemuan CSIS, warga Armenia hadir setelah Rusia pada tahun 1828. Avdoyan juga melanjutkan bagaimana terjadi peristiwa *damnatio memoriae* yang secara literal berarti penghilangan sebuah etnis dari cara mereka merebut bukti budaya fisik dan tertulis pada saat itu. Inilah yang membuat pembuktian bangsa Armenia sudah ada sebelum Rusia menjadi lebih menantang. Selain itu, karena isu ini sebenarnya terjadi sudah lama, yaitu

sebelum adanya komputer dan digitalisasi informasi, Avdoyan menyebut fenomena ini sebagai isu kesukuan dimana skalanya lebih kecil. Diperlukan pemahaman khusus terkait batas-batas isu kesukuan apa yang bisa dibawa ke mahkamah internasional atau bahkan sampai pada titik meresahkan sehingga perlu resolusi konflik yang menyeluruh.

Untuk itu, dalam usaha menemukan resolusi dari konflik ini, diperlukan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan dimana sebenarnya posisi mereka dalam konflik Nagorno-Karabakh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya secara singkat, kelompok Minsk adalah salah satu dari sekian banyaknya pihak yang terlibat. Selain itu, masih ada pihak-pihak mikro yang secara langsung terlibat dalam tingkatan yang lebih kecil.

Grafik 1

Peta Konflik Nagorno-Karabakh (Peta persebaran aktor yang terlibat dalam konflik pada konflik tahun 2012-2017)



Sumber: Olahan penulis, 2024.

Dari hasil pemetaan diatas, ditemukan beberapa pemain kunci dalam konflik yang tak berkesudahan ini. Beberapa pihak bahkan harus memainkan beberapa peran sekaligus agar tetap mengedepankan kepentingan negara terkait yang kemudian memberikan negara-negara tersebut hasil positif lebih banyak dibandingkan hasil negatifnya. Dalam hal ini, kelompok Minsk dianggap gagal dalam menciptakan kedamaian hingga saat ini. Ditemukan berbagai intervensi dari pihak-pihak ketiga, negara-negara diluar wilayah konflik, serta aktor-aktor internasional lainnya yang

memiliki kepentingan khusus di kawasan ini. Peta konflik diatas menunjukkan adanya conflict of interest dan harmony of interest yang banyak diadaptasi oleh bidang-bidang ilmu sosial, seperti ekonomi dan politik. Penyebutan antara kerjasama dan konflik ini diadaptasi dari Galtung (1917) yang hingga kini digunakan untuk menganalisis banyak sekali permasalahan antara negara core serta negara periphery. Dalam hal ini, adaptasi yang digunakan hanya sebatas penyebutan nama karena dirasa paling cocok dan menunjukkan kerjasama yang tidak hanya juga tidak terbatas pada satu bidang saja.

Nyatanya, Peran PBB atau pada saat konflik ini pecah masih dinamakan sebagai LBB sangatlah krusial dalam pembentukan badan konflik. Dimana pada awal terbentuknya tiga negara hasil dari Uni Soviet (Azerbaijan, Armenia, dan Georgia), kawasan yang kini sedang berkonflik dianggap tidak memiliki batas-batas yang pasti serta sulit untuk dijelaskan secara komprehensif. Namun, cakupan waktu yang dibahas tidak akan berada dari awal pembentukan LBB, maka dari itu, pihak ketiga ini tidak dimasukkan pada peta konflik tersebut. Lalu, hingga kini, kawasan Nagorno-Karabakh masih belum jelas dimana posisinya. OSCE (Kelompok Minsk) dalam hal ini sempat memutuskan bahwa kawasan berkonflik ini akan diberikan kedaulatannya sendiri sebagai jalan keluar. Namun, pada implementasinya, menurut Pemerintah Armenia, Azerbaijan masih mengirimkan tentara militer hingga melakukan diplomasi ofensif. Dari bagan tersebut, dapat ditemukan bahwa OSCE memiliki peran yang besar dalam mencapai perdamaian pada kawasan Nagorno-Karabakh. Namun, keberadaan organisasi internasional ini dapat menjadi pertanyaan besar, menyoal relevansinya dalam menyelesaikan konflik terkait. Sebab, kondisi isu yang semakin kompleks secara manusianya ini ditambahkan dengan kompleksitas abad ke-21, dengan adanya digitalisasi informasi juga kemodernan peralatan militer secara

fisik. Kecenderungan bahwa modernisasi adalah sebuah tantangan dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh juga tidak dapat dipungkiri lagi, sebab, dengan adanya perbedaan teknologi juga dukungan eksternal, akan ada pihak yang lebih tidak diuntungkan.

Terdapat kondisi asumsi serta saling tuduh ketika akan menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh yang terjadi di dalam forum-forum internasional. Dengan menyebutkan bahwa satu pihak memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding pihak lain adalah salah satu bentuk untuk menemukan titik temu, walaupun demikian, diperlukan kesepakatan mengenai siapa-siapa saja yang ikut campur tangan dalam penyelesaian konflik bahkan mereka yang ikut dalam konflik tersebut. Dalam bagan diatas, sangat terlihat jelas bahwa pihak-pihak ini memiliki kepentingan pribadinya dalam menyelesaikan kasus ini, namun, bahkan dari tahun 2017, Carey Cavanaugh menyatakan bahwa OSCE tidak dapat melakukan apapun selain berdiplomasi yang sama saja tidak menyelesaikan masalah ini (Cavanaugh 2017, 1). Menurut Cavanaugh, Amerika Serikat tidak bisa mundur dari kasus ini maupun lepas tangan, atau memilih penyelesaian konflik tahap terakhir, yaitu membiarkannya hingga menghilang atau selesai dengan sendirinya. Hal ini karena Amerika Serikat banyak bekerjasama dalam urusan energi dengan Tbilisi yang merupakan kota di Georgia yang terkena dampak pengungsi dari Armenia dan Azerbaijan (Cavanaugh, 2017:5). Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis dalam hal ini harus hati-hati dalam membuat keputusan mengenai konflik Nagorno-Karabakh, karena konflik ini adalah konflik pertama yang dimediasi oleh OSCE. Menurut Cavanaugh, kegagalan dalam menyelesaikan konflik ini akan memberikan citra buruk bagi OSCE sebagai sebuah organisasi yang sedang merintis untuk menjadi sebuah organisasi penyelesaian konflik (Cavanaugh 2017, 5).

Lantas, permasalahan ini tidak selesai walaupun sudah dimediasi oleh OSCE. Hingga hari ini, konflik sengketa wilayah ini masih berlangsung walau sempat ada penurunan tensi. OSCE tidak pernah terdengar lagi gerak-gerik dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik ini walaupun pada awalnya, tujuan OSCE hadir dalam konflik ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan dengan resolusi yang berkepanjangan. Berbagai resolusi konflik telah disebutkan dan ditunjukkan oleh Cavanaugh, namun, pada penelitian ini akan difokuskan pada kinerja OSCE serta kemungkinan tindak lanjut menggunakan organisasi internasional. Maka dari itu, ada beberapa tantangan yang harus dilalui oleh OSCE sebagai organisasi internasional jika seandainya akan melanjutkan tugasnya sebagai mediator konflik. Beberapa tantangan tersebut dapat diuraikan menjadi poin-poin yang dapat divisualisasikan dengan grafik berikut:

Grafik 2
Analisis Penyebab Konflik Nagorno-Karabakh (Analogi pilar untuk menjelaskan penyebab kegagalan OSCE)



Sumber: Olahan penulis, 2024.

Diperlukan pemahaman mengenai kegagalan OSCE dalam mencari jalan keluar tahun-tahun sebelumnya dengan grafik diatas. Dalam menganalisis permasalahan paling berpengaruh hingga yang sifatnya akan membantu walaupun bersifat sederhana. Dalam mengatasi permasalahan konflik Nagorno-Karabakh, analogi pilar ini dibagi menjadi dua pembagian permasalahan dari OSCE, pertama, sisi sebelah kiri yang merujuk pada sisi OSCE secara umum dan

penerapannya pada ranah hukum. Sementara sisi sebelah kanan menunjukkan kekurangan dan permasalahan internal dalam diri masing-masing individu atau kelompok yang kemudian menjadikan isu ini sebuah isu berkepanjangan.

Melihat dari sisi sebelah kiri yang lebih konkret, Azad Garibov mengaku bahwa internal OSCE ini belum sampai pada titik temu kesamaan kepentingan juga komitmen dalam menyelesaikan isu ini. Maksudnya, mereka masih belum menemukan tujuan sebenarnya dari diselesaikannya masalah ini. Karena, jika permasalahan ini selesai, permasalahan pada dua pilar setelahnya juga akan dengan mudah diselesaikan. Pilar utama ini akan mengakibatkan pilar terbawah dari sisi kiri, dimana mereka lebih menggunakan manajemen konflik daripada resolusi konflik. Ketika tujuan ini sudah ditemukan, niscaya mereka akan mendapatkan cara lebih mudah dalam mendorong adanya resolusi (Garibov 2016).

Selanjutnya, dalam melaksanakan kedua pilar ini, pilar yang ditengah juga harus segera disudahi. Dengan cara memberhentikan konflik identitas bersenjata yang makin merugikan warga sipil bahkan pemerintahan setempat. Bukan hanya satu pihak saja, namun pihak lainnya juga sama-sama melakukan tindakan bersenjata atau sama-sama menyengsarakan warga sipilnya masing-masing. Dari sudut pandang Azerbaijan, militer dari Armenia kembali melakukan provokasi militer yang membunuh warga sipil di sekolah, rumah sakit, hingga tempat-tempat beribadah.

Pada sisi kanan, poin utama dari pilar-pilar sisi ini adalah untuk menemukan perjanjian juga kesepakatan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak berkonflik. Dalam menyelesaikan konflik ini, semua pilar yang terdapat pada grafik tersebut akan saling berkaitan. Jika satu pilar selesai, maka pilar lain akan terbuka dan cenderung lebih mudah untuk diselesaikan. Ketika perjanjian ini ditemukan, melalui penyelesaian konflik yang berbagai macam

tersebut, maka diperlukan kesepakatan serta komitmen untuk mengikuti perjanjian ini. Jika sudah disetujui untuk tidak mengangkat senjata, maka pihak berkonflik tidak perlu merugikan diri sendiri dan orang lain dengan mengangkat senjata lagi.

Penyesuaian perjanjian ini akan terjadi ketika sudah tidak ada lagi asumsi negatif terhadap satu sama lain. Sebab, asumsi-asumsi buruk mengenai Armenia terhadap Azerbaijan dan sebaliknya ini juga menjadi penyebab mengapa kedamaian tidak dapat diraih. Tidak dapat dipungkiri, bahwa diperlukan kehati-hatian dalam menghadiri sebuah forum juga berdiskusi mengenai sebuah perjanjian. Namun, dengan menyingkirkan asumsi-asumsi buruk, kesepakatan dan kedamaian ini akan lebih mudah diraih. Terakhir, dalam menyelesaikan konflik ini, diperlukan pemahaman dari masyarakat juga pihak-pihak berwenang seperti pejabat yang mengurus kemaslahatan warga sipil. Perbedaan budaya serta sejarah kedua belah pihak perlu dimengerti dan difasilitasi agar ditemukan titik tengah yang sama-sama menguntungkan. Jika kedua pihak melakukan klaim, seperti keberadaan ethnic cleansing antar kedua negara. Keduanya mengaku bahwa pihak lain berusaha untuk melakukan genosida terhadap pihak lainnya, bahkan sebaliknya. Perbedaan asumsi serta sudut pandang juga adalah salah satu penyebab tidak ditemukannya penyelesaian konflik ini.

Peran Penyelesaian Melalui Organisasi Internasional

Kinerja Minsk Group memang terlihat lambat dan tidak membuahkan hasil apa-apa, karena semuanya hanya menyebabkan ketidaksepakatan serta pelanggaran hasil diskusi forum. Hal ini disebabkan karena tidak berjalannya OSCE dalam usahanya untuk menciptakan perdamaian. OSCE adalah sebuah organisasi internasional yang tidak memiliki wewenang supranasional seperti PBB atau kekuatan dalam melaksanakan wewenangnya, maka dari itu, kebijakan yang mereka kerjakan hanya

ditujukan pada negara-negara yang berkonflik dan berada dibawah bantuan negara anggota (Garibov 2016). Selain itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh OSCE sepenuhnya atas nama kelompok atau organisasi internasional ini tanpa mengatasnamakan negara asalnya masing-masing. Pihak yang tergabung dalam OSCE Kelompok Minsk ini terdiri dari Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Dari hasil pemetaan konflik sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan antara harmony of interest dan conflict of interest yang menjadi titik konflik internal dari OSCE. Amerika Serikat disini memiliki keterikatan untuk ikut serta sebagai sebuah negara adidaya, AS memiliki kepentingan untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan dari sebuah negara. AS berperan sebagai wasit atau referee ketika diskusi berlangsung dengan embel-embel menginginkan kedamaian antar negara. AS memiliki kepentingan terselubung, dimana ia membutuhkan hubungan baik juga kepentingan strategis dan ekonomi.

Asumsi serta kesimpulan dari berbagai perang proxy yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat memberikan gambaran, bagaimana negara adidaya ini sebenarnya ingin untuk menjalin hubungan baik kembali dengan Turki yang memiliki hubungan cukup baik dengan Azerbaijan. Dengan penjelasan serta grafik tersebut, terlihat dari mana latar belakang Amerika Serikat ketika negara ini ingin bergabung dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pihak-pihak lainnya seperti Prancis sebagai anggota OSCE berperan sebagai pihak yang netral, ia ingin terlihat sebagai pihak penengah yang ingin pihak yang berkonflik untuk segera menyelesaikan konflik ini dan mengikuti perjanjian yang sudah disepakati sebagai bentuk menghargai perjanjian internasional (Vevanesya & Devianti 2018). Namun dengan keberadaan ini, OSCE masih gagal untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik, karena bukti disfungsi organisasi internasional ini.

OSCE berbeda dengan organisasi lain yang memiliki kekuatan supranasional lainnya, karena sistem yang berbeda, dimana di dalam ranah OSCE, idealnya, sebuah negara tidak mengatasnamakan negaranya, tapi mengatasnamakan organisasi internasional tersebut (Garibov 2016). Dalam usahanya untuk mencapai perdamaian, OSCE sempat membuat keputusan hasil pembicaraan pada sebuah pertemuan antar anggota OSCE pada tanggal 25 Juni 2005. Dimana mereka membicarakan resolusi mana saja yang harus diikuti dari UNSC (United Nations Security Council) serta penarikan militer yang ada di wilayah okupasi. Selain itu, Uni Eropa pun sudah sempat berusaha untuk menunjukkan solidaritasnya dengan sebuah deklarasi walaupun bukan berbentuk aksi nyata. Pada bukti yang dinyatakan oleh Pemerintah Azerbaijan di laman resminya, OSCE sebagai mediator juga masih gagal untuk memberikan resolusi konflik yang menyeluruh. Peran organisasi internasional sebagai pihak ketiga seharusnya bisa menjadi sebuah dorongan dan bantuan agar masyarakat dapat hidup damai tanpa konflik, namun nyatanya, karena permasalahan internal, organisasi internasional ini tidak bisa dikendalikan sampai tidak menyelesaikan konflik tersebut.

Melihat dari isu ini, hal yang dapat dilakukan adalah kembali memunculkan isu terkait sengketa wilayah pada kancan internasional, agar OSCE bisa kembali fungsional dan menyelesaikan isu ini sampai ke akar-akarnya. Jika pada akhirnya isu ini dikembalikan kepada PBB atau mediator lain, Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis akan dicap tidak bisa menyelesaikan sebuah konflik yang pada awalnya mereka sendiri yang memutuskan untuk terjun. Dari berita terkini, sudah mulai muncul tanda-tanda bahwa konflik ini hanya akan di diaman bahkan dilupakan, seperti fase terakhir dari resolusi konflik. Dengan begitu, tentu saja konflik ini akan memakan lebih banyak korban dan tingkat kerusakan yang lebih parah. Maka

membiarkan sebuah konflik terjadi secara terus-menerus hingga menghilang pun tidak bisa menjadi sebuah jalan keluar yang berkepanjangan, karena akan menghilangkan rasa percaya serta reliabilitas OSCE sebagai mediator.

Pada grafik kedua, terdapat satu pilar yang secara implisit membutuhkan karakteristik hukum agar bisa melegalisasi pelarangan tindak militer jika seandainya OSCE mampu mendapatkan karakteristik tersebut. Namun OSCE sebagai mediator, bahkan tidak memiliki karakteristik hukum serta usahanya yang cenderung hanya diplomasi militer berdasarkan CSBM (confidence and security building measures) yang hanya bisa meraih kepercayaan lewat diplomasi (Remler 2021, 7-16). Peran organisasi internasional sebagai mediator atau pihak ketiga pun tidak lagi dianggap relevan jika petugas OSCE sendiri dianggap hanya sebagai tur kenegaraan saja, bukan sebagai penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik yang baik dapat diraih dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan mediator atau pihak ketiga seperti pada penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Dalam sejarah penyelesaian konflik ini, ditemukan bahwa sebuah organisasi penyelesaian konflik seperti OSCE (Minsk Group) berusaha untuk menurunkan tensi dan tingkat kekerasan antar dua pihak ini dengan tidak ada hasil yang holistik. Dengan adanya analisis resolusi konflik yang tertuang dengan bentuk grafik sebelumnya, diharapkan OSCE sebagai sebuah organisasi dapat menjadi lebih fungsional dan berguna dalam perjalanannya menuju perdamaian di Eropa. OSCE pada dasarnya tidak memiliki karakteristik hukum dan dorongan internal untuk menyelesaikan konflik terkait, masing-masing negara anggota didorong oleh national interest atau kebutuhan individu negara saja. Inilah yang harus segera diselesaikan, apakah negara anggota

ini semata-mata menyelesaikan konflik karena kebutuhan ekonomi dan geopolitik atau mereka ingin memberikan masa depan serta demokrasi yang baik bagi masyarakat mendatang. Negara anggota yang bergabung dalam OSCE harus merestrukturisasi secara internal dan membuat seperangkat program untuk mengubah manajemen konflik menjadi sebuah resolusi yang tepat. Hentikan agresi militer dari kedua belah pihak dan mencari akar sejarah jika pada akhirnya, konflik ini akan dikembalikan menjadi konflik identitas kesukuan.

Resolusi ini juga dapat dijadikan sebuah jalan keluar bagi negara-negara lain atau aktor lain yang memiliki konflik serupa atau konflik yang dirasa membutuhkan pihak mediator seperti OSCE untuk membantu dalam penyelesaian sengketa ini. Salah satunya adalah Indonesia yang punya karakteristik unik sebagai sebuah negara maritim yang memiliki batas negara yang bermacam-macam dengan negara lain. Penggunaan organisasi internasional sebagai pihak ketiga pun perlu ditinjau lagi keefektifannya dalam menyelesaikan masalah, karena belum tentu semua organisasi internasional memiliki fungsi yang baik atau sedang mengalami krisis internal. Baru-baru ini, Indonesia juga sedang dilanda konflik mengenai pengungsi, maka dari itu, jalan keluar untuk menggunakan organisasi internasional sebagai forum pertemuan juga bisa dijadikan opsi. Namun, sebelum terjun pada resolusi tersebut, Indonesia juga perlu mengulas kembali urgensi dan karakteristik hukum organisasi tersebut.

Ditemukan beberapa resolusi yang cukup bisa menjadi pemikiran pihak-pihak yang nantinya akan mengambil kesimpulan dari penelitian ini, dengan membuka diskusi internal agar OSCE bisa kembali menentukan komitmen serta tujuan dalam menyelesaikan konflik, membatasi pihak-pihak yang ikut campur dalam urusan penyelesaian konflik, memastikan bahwa pihak-pihak berkonflik melaksanakan hasil perjanjiannya masing-masing, serta

menyiapkan strategi tambahan atau sanksi jika sewaktu-waktu pihak-pihak berkonflik ini menyalahi perjanjiannya. Selain itu, sejarah yang dimiliki oleh kedua belah pihak harus digali lebih dalam, sumber-sumber ini bisa ditarik benang merahnya dari dokumen-dokumen sejarah yang secara kebudayaannya memiliki kemiripan atau bahkan bersumber dari kebudayaan lain. Seperti kebudayaan Albania yang banyak menjadi sumber bagi dokumen-dokumen utama dari Armenia serta kemiripan karakteristik agama dan literatur antara kedua negara (Avdoyan, 1995:163-164).

Sebagian besar dari resolusi ini sudah pernah dilaksanakan, namun tidak ada hasilnya. Hasil nihil ini harus dikembalikan lagi kepada bagaimana OSCE sebagai organisasi harus bisa mempertahankan perjanjiannya serta memberikan resolusi yang jauh lebih menyeluruh juga adaptif. Pasalnya, ketika sebuah perjanjian ditegakkan namun negara anggota OSCE tidak lagi mau menyelesaikan konfliknya, untuk apa ada organisasi ini yang hanya membuang-buang waktu juga mempersulit masyarakat setempat. Pihak Armenia serta Azerbaijan harus benar-benar hadir dalam sebuah diskusi untuk menyelesaikan masalah ini, membagi wilayahnya, atau menurunkan tensi dengan menyudahi agresi militer. Karakteristik hukum harus dimiliki oleh OSCE agar bisa bergerak sebagaimana layaknya organisasi lain agar proses mediasi bisa dilaksanakan dengan baik, juga mengirimkan delegasinya untuk melihat apakah perjanjian juga hukum yang mereka setuju ini ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abilov, S. (2018). OSCE Minsk Group: Proposals and Failure, the View from Azerbaijan. *PERSISTENT RISE OF CHINA GLOBAL CHALLENGES AND REGIONAL DYNAMICS*, 20(1), 143–164.
<https://doi.org/10.2307/26301072>
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10.
- Avdoyan, L. (1995). Nagorno Karabakh: An historical perspective. *International Journal on Group Rights*, 3(2), 161–167.
<http://www.jstor.org/stable/24674479>
- Burton, J. (1986). “THE THEORY OF CONFLICT RESOLUTION”, *Current Research on Peace and Violence*, 9(3), 125–130. Tersedia dalam <http://www.jstor.org/stable/40725036> (diakses pada 29 November 2023)
- Bush, K. D., & Keyman, E. F. (1997). Identity-Based Conflict: Rethinking Security in a Post-Cold War World. *Global Governance*, 3(3), 311–328.
<http://www.jstor.org/stable/27800174>
- Cavanaugh, C. (2017). Renewed Conflict Over Nagorno-Karabakh. Council on Foreign Relations. <http://www.jstor.org/stable/resrep05705>
- Center for Preventive Action of Council on Foreign Relations. (n.d.). Nagorno-Karabakh Conflict | Global Conflict Tracker. Council on Foreign Relations. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict#Background-0>
- Garibov, A. (2016). Why the OSCE Keeps Failing to Make Peace in Nagorno-Karabakh. *The National Interest*. Retrieved October 21, 2023 from <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-the-osce-keeps-failing-make-peace-nagorno-karabakh-16161>
- Gualtieri, L., Rauch, E., & Vidoni, R. (2021). Emerging research fields in safety and ergonomics in industrial collaborative robotics: A systematic literature review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 67, 101998.
- Jeong, H. W. (2008). Understanding conflict and conflict analysis.
- Kocharyan, S. (2016). WHY IS THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT STILL NOT RESOLVED?. Retrieved October 21, 2023 from

- https://www.mfa.am/filemanager/Statics/A_nkr_en.pdf
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Publications.
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. (n.d). Retrieved on October 21, 2023 from <https://www.mfa.am/en/nagorno-karabakh-issue>
- President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. (n.d). Armenia-Azerbaijan conflict. Retrieved October 22, 2023 from <https://president.az/en/pages/view/azerbaijan/karabakh>
- Rammelt, Crelis & Boes, Jan. (2013). Galtung meets Daly: A framework for addressing inequity in ecological economics. *Ecological Economics*. 93. 269-277. 10.1016/j.ecolecon.2013.06.013.
- Remler, P. (2021). *The OSCE as Sisyphus: Mediation, Peace Operations, Human Rights*. Istituto Affari Internazionali (IAI). <http://www.jstor.org/stable/resrep30942>
- Rogier, E. (2004). *Revisiting Conflict Resolution. In Rethinking Conflict Resolution in Africa: Lessons from the Democratic Republic of the Congo, Sierra Leone and Sudan* (pp. 19–28). Clingendael Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep05412>.6
- Sandole, D. (1998). *A Comprehensive Mapping of Conflict and Conflict Resolution: A Three Pillar Approach*. *Peace and Conflict Studies*. <https://doi.org/10.46743/1082-7307/1998.1389>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Vevanesya, G., & Devianti, A. (2018). Kegagalan OSCE Minsk Group dalam Menangani Konflik Perebutan Wilayah Nagorno-Karabakh 2014-2017. https://repository.unair.ac.id/82035/3/JURNAL_Fis.HI.23%2019%20Dev%20k.pdf
- Arischa, K., Aldri Frinaldi. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). *Jurnal Tanah Pilih*, 3(1)